



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 188.343/Kcp.463 -Hukum/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG
TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 dan Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. melaporkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 188.343/Kep. 463 -Hukum/2022
TANGGAL : 9 September 2022
TENTANG : TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

- Pengarah : 1. Bupati Cirebon
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
 2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cirebon
 3. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
 4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
 5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
 6. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
 7. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
 8. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
 9. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
 10. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
 11. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon
 12. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 13. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

14. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
15. Sub Koordinator Produk Hukum Pengaturan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
16. Sub Koordinator Produk Hukum Penetapan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
17. Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
18. Unsur Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
19. Unsur Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
20. Unsur Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

14. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
15. Sub Koordinator Produk Hukum Pengaturan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
16. Sub Koordinator Produk Hukum Penetapan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
17. Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
18. Unsur Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
19. Unsur Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
20. Unsur Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON